

Pendekatan Militeristik dalam Komunikasi Politik: Studi Kasus Gaya Kepemimpinan dan Pola Intruksi Sekretaris Kabinet

Putri Disa Kiftiani^{1*}, Ataabik Muktaman²

^{1,2}Universitas Paramadina

Corresponding Author's e-mail : putri.disa@students.paramadina.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2899 - 2916

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3190>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3190>

Article History:

Received: 03-07-2026

Revised: 27-08-2026

Accepted: 27-08-2026

Abstract : This study analyzes Teddy Indra Wijaya's communication style and leadership as Cabinet Secretary within the context of governmental political communication. It employs a case study method with a qualitative descriptive approach to gain an in-depth understanding of communication patterns, leadership style, and the meanings embedded in bureaucratic governance practices. The theoretical concept used is Ramlan Surbakti's theory of legitimacy, which views legitimacy as public acceptance and recognition of government authority, decisions, and policies. Based on this framework, communication that is firm, structured, and hierarchical is understood not only as a mechanism for delivering instructions, but also as an effort to build work order, strengthen cabinet coordination, and maintain public recognition of governmental authority. The findings show that Teddy's communication style tends to be bureaucratic and top-down, with implications for political message control, internal consolidation, and the formation of an image of a responsive and controlled government. These findings indicate that in strategic office, political communication serves as an important instrument for strengthening institutional legitimacy and maintaining public trust in the government.

Keywords : Political Communication, Cabinet Secretary, Public Legitimacy

Abstrak : Penelitian ini menganalisis gaya komunikasi dan kepemimpinan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet dalam konteks komunikasi politik pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam pola komunikasi, gaya kepemimpinan, dan makna tindakan yang muncul dalam praktik birokrasi pemerintahan. Konsep teori yang digunakan adalah teori legitimasi Ramlan Surbakti, yang memandang legitimasi sebagai penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan, keputusan, dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan kerangka tersebut, komunikasi yang tegas, terstruktur, dan hierarkis dipahami bukan hanya sebagai mekanisme penyampaian instruksi, tetapi juga sebagai upaya membangun keteraturan kerja, menguatkan koordinasi kabinet, serta menjaga pengakuan publik terhadap otoritas pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi Teddy cenderung birokratis-top down dan berimplikasi pada pengendalian pesan politik, konsolidasi internal, serta pembentukan citra pemerintahan yang responsif dan terkendali. Temuan ini menegaskan bahwa dalam jabatan strategis, komunikasi politik berperan sebagai instrumen penting dalam memperkuat legitimasi institusional dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kata Kunci : Komunikasi Politik, Sekretaris Kabinet, Legitimasi Publik

PENDAHULUAN

Komunikasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu unsur fundamental yang menentukan bagaimana kebijakan dirumuskan, dijelaskan, disebarluaskan, dan

dipahami oleh publik. Dalam konteks pemerintahan modern, komunikasi tidak lagi hanya dipandang sebagai medium penyampaian informasi, melainkan sebagai bagian dari mekanisme kekuasaan yang membentuk legitimasi, memperkuat koordinasi institusional, dan memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap arah kebijakan negara. (Yusuf et al., 2026). Kualitas komunikasi pejabat publik memiliki korelasi yang erat dengan efektivitas tata kelola pemerintahan, karena setiap pesan yang disampaikan pada dasarnya merepresentasikan bukan hanya isi kebijakan, tetapi juga karakter kepemimpinan yang melatarinya. Salah satu tipologi kepemimpinan yang relevan untuk membaca karakter komunikasi pejabat publik adalah gaya kepemimpinan militeristik, yaitu pola kepemimpinan yang menonjolkan sistem komando, ketegasan, kedisiplinan tinggi, kepatuhan mutlak bawahan, serta komunikasi yang cenderung satu arah dan minim ruang bagi saran maupun kritik karena pemimpin dengan gaya ini lebih banyak menggunakan sistem perintah, bersikap otoriter, menuntut disiplin ketat dari bawahan, dan menjalankan komunikasi yang searah (Ayu Rahma Yulia et al., 2025). Tipologi ini secara teoritis berbeda dari gaya demokratis maupun paternalistik, meskipun dalam praktiknya ketiganya dapat berpadu dalam diri seorang pejabat, tergantung konteks kelembagaan dan latar belakang kariernya.

Gaya komunikasi pejabat publik menjadi penting karena berhubungan langsung dengan cara otoritas dijalankan di dalam struktur birokrasi. Dalam organisasi pemerintahan, komunikasi yang jelas, tegas, dan terarah dapat menciptakan kepastian tindakan, mempercepat koordinasi, serta mengurangi ambiguitas dalam pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, komunikasi yang terlalu kaku dan satu arah sebagaimana ciri khas pendekatan militeristik berpotensi membatasi dialog, mempersempit partisipasi, dan membentuk hubungan kerja yang sangat hierarkis. Karena itu, gaya komunikasi pejabat tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pilihan retorik, melainkan sebagai ekspresi dari orientasi kepemimpinan dan cara kekuasaan dikelola dalam praktik administratif. Posisi Sekretaris Kabinet memiliki signifikansi yang khusus dalam struktur pemerintahan karena jabatan ini berada pada titik strategis antara pusat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sekretaris Kabinet tidak hanya menjalankan fungsi koordinatif, tetapi juga berperan dalam menyelaraskan jalannya kebijakan antar-aktor pemerintahan agar tetap konsisten dengan arah presiden. Dalam posisi seperti ini, komunikasi yang dibangun menjadi sangat menentukan karena setiap instruksi, penegasan, maupun klarifikasi yang disampaikan akan memengaruhi ritme kerja birokrasi sekaligus membentuk citra pemerintah di mata publik. Dengan kata lain, jabatan ini menuntut bukan hanya kecermatan administratif, tetapi juga kapasitas komunikasi yang mampu menjaga efektivitas sekaligus legitimasi. (Teka, 2021)

Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet merupakan figur yang relevan untuk dikaji dalam kerangka tersebut. Terutama karena latar belakang kariernya sebagai perwira militer aktif lulusan akademi militer dan mantan anggota Komandan Pasukan Khusus (Kopassus) yang tetap mempertahankan status keperwiraannya selama menjabat posisi sipil, birokratis ini sebuah kondisi oleh sejumlah pihak dipandang sebagai bagian dari tren militerisasi dalam politik Indonesia. Publik cenderung menangkap karakter pejabat bukan hanya dari jabatan yang diemban, tetapi juga dari cara ia berbicara, memberi arahan, menata respon, dan membangun kedekatan simbolik dengan audiens. Analisis terhadap Teddy Indra Wijaya perlu diarahkan pada bagaimana pola instruksi dan komunikasinya dibentuk, bagaimana kepemimpinannya dijalankan, dan bagaimana keduanya dimaknai dalam ruang publik. (Genesa et al., 2025)

Beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung persoalan gaya kepemimpinan militeristik maupun komunikasi politik pejabat, namun dengan fokus dan konteks yang berbeda. Pertama (Djuyandi, 2023) menelusuri perkembangan peran militer dalam pemerintahan Indonesia dan menemukan bahwa meskipun upaya profesionalisme terus didorong untuk

mengurangi upaya profesionalisasi militer terus didorong untuk mengurangi keterlibatannya dalam ranah politik-sipil, berbagai hambatan struktural masih membuat pengaruh militer tetap bertahan dalam praktik pemerintahan, namun kajian ini bersifat makro historis dan belum menyentuh level analisis komunikasi maupun pola instruksi seorang pejabat tertentu. Kedua (Pebriawan *et al.*, 2023) meneliti dominasi aktor militer di dalam struktur birokrasi sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan menemukan bahwa kehadiran figur-figur berlatar belakang militer dalam jabatan sipil tetap membawa pengaruh terhadap pola kerja kelembagaan, meskipun lingkungan kerja tersebut secara formal tidak sekaku institusi militer; temuan ini relevan sebagai pembanding karena menunjukkan adanya tarik-menarik antara identitas militer dan tuntutan fungsi sipil-koordinatif, namun studi tersebut belum menyorot aspek gaya komunikasi maupun persepsi publik. Ketiga (Bahri *et al.*, 2024) memetakan karakteristik kepemimpinan militeristik meliputi ketegasan dalam pengambilan keputusan, sistem komando, kedisiplinan tinggi, serta minimnya pelibatan pendapat bawahan dalam situasi berisiko tinggi sekaligus mengidentifikasi kelebihan dan kelemahannya baik dalam konteks militer maupun non-militer; namun kajian tersebut masih bersifat konseptual melalui studi literatur dan belum diterapkan pada studi kasus aktor pemerintahan tertentu. Sebagaimana disebutkan pada penelitian lain, gaya komunikasi yang tegas dan terstruktur kerap diasosiasikan dengan efisiensi, kedisiplinan, dan kejelasan arah kerja (Purba & Rozikin, 2025). Dalam birokrasi yang kompleks, karakter semacam ini sering dianggap sebagai keunggulan karena dapat memperkuat ketertiban organisasi dan mempercepat proses koordinasi. Akan tetapi, ketegasan yang berlebihan juga dapat menimbulkan kesan dominasi, membatasi fleksibilitas, dan mengurangi ruang deliberasi di dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, penelitian mengenai gaya komunikasi dan kepemimpinan tidak cukup berhenti pada identifikasi bentuk luarnya, melainkan harus menelaah bagaimana gaya tersebut bekerja secara kontekstual, termasuk bagaimana ia diterima oleh aktor internal maupun masyarakat luas.

Gap penelitian dari keempat tinjauan tersebut menunjukkan tiga celah utama. Pertama, kajian Djuyandi (2023) dan Pebriawan *et al.* (2023) memperlihatkan bahwa pengaruh dan identitas militer tetap bertahan ketika figur berlatar belakang militer menduduki posisi sipil-birokratis, namun keduanya berhenti pada level analisis kelembagaan dan struktural belum masuk ke ranah komunikasi personal seorang pejabat, apalagi pola instruksi yang ia jalankan sehari-hari dalam berinteraksi dengan bawahan maupun publik. Kedua, kajian konseptual Bahri *et al.* (2024) telah memetakan ciri-ciri kepemimpinan militeristik secara umum ketegasan, sistem komando, dan minimnya pelibatan bawahan tetapi kajian ini bersifat teoritis-literatur dan belum diuji pada studi kasus aktor pemerintahan nyata, sehingga belum diketahui bagaimana karakteristik tersebut benar-benar termanifestasi dalam praktik komunikasi seorang pejabat tertentu. Ketiga, temuan Purba dan Rozikin (2025) bahwa gaya komunikasi tegas dan terstruktur kerap diasosiasikan dengan efisiensi dan kedisiplinan kerja birokrasi masih bersifat generalisasi lintas kasus, belum menyorot secara spesifik pejabat yang sekaligus berstatus perwira aktif TNI sehingga pola instruksinya berpotensi merupakan transfer langsung dari kultur komando militer ke ranah komunikasi politik-birokratis sipil. Dengan kata lain, literatur yang ada baru menyentuh peran militer di level struktur kelembagaan (Djuyandi, 2023; Pebriawan *et al.*, 2023) atau tipologi kepemimpinan militeristik secara konseptual (Bahri *et al.*, 2024; Purba & Rozikin, 2025), tetapi belum ada penelitian yang secara khusus membedah pola instruksi dan gaya komunikasi seorang pejabat inti kabinet berlatar belakang militer aktif sebagai unit analisis, sekaligus mengaitkannya dengan bagaimana pola tersebut dimaknai dan diterima oleh publik

Novelty (kebaruan) penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini menjembatani dua kutub kajian yang selama ini berjalan terpisah kajian struktural tentang peran militer dalam birokrasi dan kajian konseptual tentang tipologi kepemimpinan militeristik dengan menempatkan keduanya dalam satu studi kasus konkret, yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, seorang perwira aktif TNI yang menduduki jabatan koordinatif sipil di pusat kekuasaan. Kedua, penelitian ini menggeser unit analisis dari gaya komunikasi secara umum menjadi pola instruksi yang lebih spesifik dan operasional, sehingga mampu menangkap bagaimana kultur komando militer diterjemahkan ke dalam praktik komunikasi birokrasi sipil sehari-hari sesuatu yang belum disentuh baik oleh kajian struktural maupun kajian tipologis sebelumnya. Ketiga, penelitian ini mengangkat paradoks empiris yang belum banyak dijelaskan literatur, yaitu bagaimana pola komunikasi yang secara teoritis bercorak militeristik (tegas, satu arah, berbasis komando) justru dipersepsikan positif oleh publik di era digital, sehingga penelitian ini berkontribusi memperluas pemahaman tentang relasi antara ketegasan bergaya komando dan legitimasi komunikasi pemerintahan, sekaligus menjadi jembatan konseptual antara studi kepemimpinan militer, komunikasi politik, dan tata kelola birokrasi kontemporer di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus untuk memahami secara mendalam gaya komunikasi dan kepemimpinan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk menelaah makna, pola, dan karakter komunikasi yang muncul dalam pelaksanaan fungsi koordinatif pemerintahan. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam, holistik, dan kontekstual melalui pengumpulan data yang kaya dari berbagai sumber informasi. (Assyakurrohim *et al.*, 2022). Studi kasus dipandang sesuai karena objek yang diteliti bersifat spesifik, kontekstual, dan terkait erat dengan praktik komunikasi politik dalam lingkup pemerintahan presidensial. Fokus penelitian diarahkan pada karakteristik gaya komunikasi dan kepemimpinan, alasan penggunaan pola komunikasi yang tegas dan terstruktur, serta implikasinya terhadap efektivitas kerja kabinet dan persepsi positif publik.

Pada penelitian ini, studi kasus dipahami sebagai analisis atas fenomena yang dibatasi oleh konteks tertentu, baik dari segi waktu, ruang, maupun karakteristik peristiwanya, sehingga memungkinkan peneliti menguraikan keterkaitan antara aktor, peristiwa, dan makna secara lebih komprehensif. Berdasarkan pengertian tersebut, pembahasan mengenai gaya komunikasi Teddy Indra Wijaya dapat ditempatkan sebagai studi kasus komunikatif yang bersumber pada data media, pernyataan resmi, serta respons publik di ruang digital, sehingga analisis tidak semata-mata mendeskripsikan kejadian, melainkan juga menafsirkan bagaimana pesan dikonstruksi, dimaknai, dan dihubungkan dengan legitimasi pemerintahan. Melalui pemanfaatan dokumentasi media sebagai sumber utama yang kemudian diperkuat dengan pembacaan literatur akademik, penelitian ini dapat menelaah kasus Teddy sebagai praktik komunikasi pemerintahan yang empiris, terukur, dan relevan untuk menjelaskan relasi antara gaya komunikasi pejabat publik, pembentukan makna, dan penerimaan sosial atas otoritas negara (Ruhainah & Wijaya, 2026).

Teori legitimasi bisa ditempatkan sebagai *lensa analitis* yang digunakan untuk membaca data, bukan sebagai teori yang berdiri sendiri di luar proses pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, teori legitimasi dapat dijelaskan sebagai konsep yang membantu menafsirkan bagaimana pesan, tindakan, dan pola komunikasi pejabat publik memperoleh pengakuan atau penerimaan sosial dari publik, sehingga data dari media, pernyataan resmi, dan dokumen pendukung dianalisis berdasarkan sejauh mana ia menunjukkan proses penguatan atau pelemahan legitimasi (Fadly,

2024). Dengan demikian, teori legitimasi berfungsi untuk mengarahkan pembacaan terhadap makna komunikasi Teddy Indra Wijaya, terutama dalam melihat bagaimana gaya kepemimpinan dan pola penyampaian pesan berperan dalam membangun penerimaan publik terhadap otoritas pemerintahan.

Objek penelitian ini adalah praktik komunikasi politik dan gaya kepemimpinan Teddy Indra Wijaya dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Kabinet. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumen dan materi komunikasi resmi yang berkaitan langsung dengan aktivitas Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, seperti pernyataan resmi, dokumentasi kegiatan, publikasi kelembagaan, dan bentuk komunikasi institusional lainnya. Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, serta pemberitaan media kredibel yang relevan dengan komunikasi politik, kepemimpinan birokrasi, dan persepsi publik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka agar fenomena yang diteliti dapat dipahami secara empiris sekaligus ditempatkan dalam kerangka konseptual yang memadai. (Nilamsari, 2014)

Penelitian ini memanfaatkan data primer yang berasal dari pemberitaan media, pernyataan resmi, serta dokumen pendukung yang merekam dinamika komunikasi Teddy Indra Wijaya dalam konteks pemerintahan. Penggunaan data tersebut menempatkan penelitian pada orientasi analitis yang kuat, sebab fokus kajian tidak diarahkan semata-mata pada deskripsi peristiwa, melainkan pada penafsiran mendalam terhadap pola komunikasi, pilihan diksi, konstruksi pesan, dan implikasi makna yang muncul dari setiap sumber data yang dianalisis. Dengan demikian, data penelitian tidak diperlakukan sebagai informasi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai landasan untuk membaca bagaimana gaya komunikasi dibentuk, dimaknai, dan dihubungkan dengan legitimasi serta persepsi publik dalam ruang komunikasi pemerintahan digital.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian, terutama yang berkaitan dengan pola komunikasi, gaya kepemimpinan, bentuk instruksi, dan respons publik. Data yang telah dipilah kemudian disajikan secara naratif-tematik untuk memudahkan penafsiran hubungan antar-temuan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen resmi, pemberitaan media, dan literatur akademik agar hasil analisis tetap konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Triangulasi sumber tidak sekadar membandingkan data dari beberapa sumber, tetapi menelusuri konsistensi informasi melalui perbedaan waktu, alat, dan sudut pandang sehingga peneliti dapat menilai apakah suatu temuan benar-benar stabil, saling menguatkan, dan tidak bergantung pada satu sumber tunggal. (Husnullail & Dkk, 2024). Melalui langkah tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai komunikasi dan kepemimpinan Teddy Indra Wijaya dalam konteks pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Gaya Kepemimpinan Teddy Indra Wijaya dalam Komunikasi Politik

Kedudukan Sekretaris Kabinet dalam arsitektur pemerintahan menempatkan pejabat yang mendudukinya pada titik yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan dukungan terhadap pengelolaan manajemen kabinet, penyelarasan arah kebijakan, serta fasilitasi proses pengambilan keputusan Presiden. Jabatan ini tidak memadai untuk dipahami semata-mata sebagai fungsi administratif, melainkan harus dilihat sebagai simpul koordinatif yang menuntut kecermatan komunikasi, ketegasan orientasi, dan kemampuan menjaga kesinambungan pesan di lingkungan pemerintahan pusat. Dalam kerangka tersebut, gaya kepemimpinan Teddy Indra

Wijaya dapat dibaca sebagai bentuk kepemimpinan yang menekankan ketertiban, kejelasan instruksi, dan stabilitas alur kerja birokrasi. Corak kepemimpinan ini memperlihatkan bahwa komunikasi tidak hanya bekerja sebagai medium penyampaian pesan, tetapi juga sebagai perangkat untuk mengonsolidasikan kerja kelembagaan secara lebih efektif.

Karakteristik pertama yang menonjol dalam gaya kepemimpinan Teddy Indra Wijaya adalah penekanan pada kejelasan orientasi kerja. Posisi Sekretaris Kabinet yang berhubungan langsung dengan dukungan substansi kebijakan, pengelolaan agenda kabinet, serta tindak lanjut proses pemerintahan menempatkan kejelasan arah sebagai kebutuhan yang mendasar. Dalam birokrasi yang kompleks, kepemimpinan yang tidak dibangun di atas arah komunikasi yang jelas cenderung membuka ruang bagi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, pola kepemimpinan Teddy dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap proses komunikasi dalam kabinet tetap memiliki sasaran, prioritas, dan urutan tindakan yang terdefinisi secara tegas.

Karakteristik kedua tercermin pada kuatnya orientasi terhadap keteraturan. Dalam konteks kepemimpinan birokratis, keteraturan tidak hanya berkaitan dengan disiplin personal, tetapi juga dengan kapasitas membangun sistem kerja yang konsisten dan dapat diikuti oleh unit-unit kerja lainnya. Bagi Sekretaris Kabinet, keteraturan menjadi elemen yang sangat penting karena fungsi kelembagaannya tidak berhenti pada penyampaian informasi, melainkan meluas pada pengelolaan alur keputusan, penataan agenda, dan sinkronisasi tindak lanjut kebijakan. Keteraturan tidak hanya berfungsi sebagai prinsip administrasi, tetapi menjadi perangkat kerja untuk memastikan setiap keputusan Presiden bergerak melalui alur koordinasi yang tertata, setiap agenda pemerintahan tersusun secara sistematis, dan setiap tindak lanjut kebijakan dapat dipantau hingga pada tahap implementasi (Susanto, 2019). Dalam konteks ini, Sekretariat Kabinet menjalankan peran debottlenecking, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan agar arahan Presiden tidak berhenti pada level keputusan, melainkan berlanjut menjadi tindakan yang konsisten di kementerian dan lembaga terkait. Dengan demikian, gaya kepemimpinan Teddy Indra Wijaya dapat dipahami sebagai pola kepemimpinan yang menempatkan keteraturan sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas kerja kabinet.

Menurut Teddy Indra Wijaya memperlihatkan karakter kepemimpinan yang adaptif, tanggap, dan strategis dalam komunikasi politik. Hal tersebut tercermin dari berbagai pemberitaan yang menggambarkan kemampuannya merespons pertanyaan media secara tenang, runtut, dan terarah, sekaligus menempatkannya sebagai figur yang mampu menyesuaikan pola komunikasi dengan tuntutan ruang publik digital. Dalam kerangka ini, komunikasi yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan pesan yang berkontribusi pada konsistensi narasi pemerintahan dan penguatan posisi kelembagaan di mata publik (Merdeka, 2026).

Menurut (Wakik, 2026), gaya kepemimpinan Teddy juga kerap dipahami memiliki orientasi humanis melalui kecenderungannya untuk hadir langsung di tengah masyarakat dan menjangkau akar rumput. Pola tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dijalankan tidak sepenuhnya berjarak secara birokratis, melainkan berusaha menghadirkan kedekatan, keakraban, dan keterhubungan emosional dengan publik. Dengan demikian, karakter kepemimpinan Teddy dalam komunikasi politik dapat dipahami sebagai perpaduan antara pengendalian narasi, kedekatan simbolik, dan pembentukan citra pemerintahan yang lebih terbuka serta komunikatif.

Gaya komunikasi yang ringkas, langsung, dan tidak bertele-tele menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dijalankan bertumpu pada kepraktisan birokratis. (Carcia et al., 2025). Dalam komunikasi pemerintahan, pesan yang terlalu panjang cenderung membuka ruang tafsir yang

lebih luas, sedangkan pesan yang terlalu longgar berisiko menghambat tindak lanjut karena tidak segera terbaca sebagai arahan yang operasional. Atas dasar itu, komunikasi yang padat dan terarah tidak semata-mata berkaitan dengan selera gaya, tetapi merupakan bagian dari strategi kepemimpinan untuk menjaga agar pesan tetap efektif, mudah dipahami, dan cepat direspons oleh struktur birokrasi.

Karakteristik gaya kepemimpinan Teddy Indra Wijaya dapat ditafsirkan sebagai bentuk komunikasi politik yang tidak hanya menekankan kedekatan dengan publik, tetapi juga memperlihatkan kapasitas untuk membangun penerimaan terhadap otoritas yang dijalankan. Dalam kerangka konsep teori legitimasi (Surbakti, 1992), pola komunikasi yang ringkas, langsung, responsif, dan terarah menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak semata-mata bertumpu pada legitimasi formal, melainkan juga pada sejauh mana pesan dan tindakan pemimpin memperoleh pengakuan sosial dari publik. Dengan demikian, gaya komunikasi yang adaptif dan humanis tersebut menghadirkan kesan bahwa otoritas yang dijalankan memiliki dasar penerimaan yang kuat, karena publik tidak hanya menilai aspek kewenangan formal, tetapi juga menimbang kesesuaian antara praktik kepemimpinan dan ekspektasi terhadap pejabat pemerintahan yang efektif, komunikatif, serta dapat dipercaya. Oleh karena itu, karakteristik kepemimpinan Teddy dalam komunikasi politik dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan legitimasi, di mana efektivitas komunikasi berkontribusi terhadap penguatan pengakuan publik atas posisi dan perannya dalam struktur pemerintahan.

Karakteristik lain yang dapat diamati adalah adanya kecenderungan kuat pada pengendalian pesan. Pada jabatan yang berada dekat dengan pusat pengambilan keputusan, pengendalian pesan memiliki arti penting karena setiap pernyataan, klarifikasi, maupun informasi yang disampaikan berpotensi membentuk persepsi mengenai arah pemerintah. Pengendalian pesan dalam konteks kontrol persepsi publik tidak cukup dimaknai sebagai pembatasan arus komunikasi, tetapi harus dipahami sebagai kemampuan mengatur titik tekan, memilih substansi yang relevan, dan menempatkan informasi secara proporsional sesuai kebutuhan kelembagaan (Artis, 2011). Dengan demikian, gaya kepemimpinan Teddy Indra Wijaya memperlihatkan adanya kesadaran bahwa komunikasi politik tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga konsistensi posisi pemerintah di mata internal birokrasi maupun publik.

Gaya kepemimpinan Sekretariat Kabinet memperlihatkan penekanan pada responsivitas. Sekretaris Kabinet tidak hanya bekerja dalam ranah penyusunan agenda dan dukungan teknis, tetapi juga pada kebutuhan untuk memastikan bahwa jalannya kebijakan dapat dikawal melalui komunikasi yang cepat, relevan, dan terarah (Azel *et al.*, 2026). Responsivitas ini tidak identik dengan komunikasi yang semata-mata aktif secara permukaan, melainkan menunjuk pada kemampuan menjawab kebutuhan koordinasi secara tepat waktu dan sesuai konteks. Dalam pemerintahan yang ditandai oleh perputaran informasi yang cepat, keterlambatan respons dapat menciptakan kesan lemahnya koordinasi atau kaburnya arah kebijakan. Pola kepemimpinan Teddy menunjukkan kecenderungan untuk menjaga tempo kerja yang sigap tanpa kehilangan kendali atas substansi pesan.

Karakteristik kepemimpinan Teddy Indra Wijaya juga dapat dibaca melalui relasinya dengan fungsi institusional Sekretariat Kabinet sebagai lembaga yang memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemimpin pada posisi tersebut harus mampu bertindak tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penghubung strategis antara kebutuhan politik di tingkat atas dan pelaksanaan birokratis di tingkat operasional. Karena itu, jenis kepemimpinan yang dibutuhkan bukanlah kepemimpinan yang ekspresif secara berlebihan, melainkan kepemimpinan yang

mampu menata relasi kerja, menjaga ritme koordinasi, dan memastikan bahwa kebijakan dapat diteruskan ke dalam mekanisme pemerintahan dengan hambatan seminimal mungkin. Dalam pengertian ini, gaya Teddy lebih dekat pada kepemimpinan fungsional yang mengutamakan efisiensi hubungan kerja.

Aspek lain yang menonjol adalah bahwa kepemimpinan Teddy tampak tidak mengandalkan personalisasi secara berlebihan. Dalam banyak praktik komunikasi politik, figur pejabat publik kerap membangun pengaruh melalui penonjolan persona yang dominan. Akan tetapi, dalam konteks Sekretaris Kabinet, kepemimpinan yang terlalu bertumpu pada personalisasi justru berpotensi menggeser fokus dari fungsi kelembagaan kepada figur individual. Corak kepemimpinan Teddy justru tampak lebih menegaskan fungsi jabatan daripada menampilkan diri secara berlebihan sebagai pusat perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan kepemimpinannya lebih banyak dibangun melalui efektivitas fungsi, ketertiban komunikasi, dan kemampuan menjalankan mandat institusional secara konsisten.

Gaya kepemimpinan Sekretariat Kabinet sekarang dapat dikatakan bahwa otoritas tidak selalu dibangun melalui retorika yang luas atau ekspresi simbolik yang mencolok, tetapi dapat pula dibentuk melalui konsistensi, kepastian arah, dan kemampuan menjaga disiplin makna. Otoritas pada kasus ini cenderung lebih kuat dalam konteks birokrasi karena tidak bergantung pada popularitas sesaat, melainkan pada keterandalan proses kerja. Kepemimpinan Teddy Indra Wijaya dalam komunikasi politik memperlihatkan model otoritas yang bekerja melalui kejelasan prosedural dan kepastian koordinasi (Cahyono, 2026). Model tersebut menjadi penting karena pemerintahan modern tidak hanya membutuhkan figur yang tampak aktif, tetapi juga figur yang mampu memastikan bahwa aktivitas pemerintahan tetap berjalan dalam kerangka yang stabil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bahasa dan gaya kepemimpinan Teddy memperlihatkan hubungan yang erat antara komunikasi dan legitimasi institusional. Dalam jabatan yang sangat dekat dengan Presiden, setiap bentuk komunikasi akan dibaca bukan hanya sebagai pernyataan pejabat, tetapi juga sebagai indikator mengenai seberapa tertib, siap, dan terkendalnya kerja pemerintah. Oleh karena itu, kepemimpinan yang mampu menjaga komunikasi tetap konsisten secara tidak langsung berperan dalam membangun legitimasi kelembagaan. Teddy Indra Wijaya tampak menempatkan komunikasi sebagai bagian dari upaya mempertahankan kepercayaan terhadap kapasitas pemerintah dalam mengelola kebijakan dan agenda pemerintahan.

Kepemimpinan yang menekankan kejelasan, keteraturan, dan pengendalian pesan pada akhirnya menunjukkan bahwa komunikasi politik dalam jabatan Sekretaris Kabinet tidak dapat dipahami sebagai pelengkap administratif semata. Komunikasi justru merupakan elemen inti yang menghubungkan keputusan politik dengan ritme kerja birokrasi. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan Teddy Indra Wijaya memperlihatkan bahwa efektivitas pejabat publik tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan mengelola komunikasi sebagai instrumen koordinasi, stabilisasi, dan penegasan arah pemerintahan. Dari keseluruhan karakteristik tersebut, dapat dipahami bahwa kepemimpinan Teddy cenderung bergerak dalam corak birokratis-strategis yang tegas, terukur, dan berorientasi pada efektivitas kelembagaan. Secara keseluruhan, karakteristik gaya kepemimpinan Teddy Indra Wijaya dalam komunikasi politik menunjukkan perpaduan antara disiplin birokratis, responsivitas koordinatif, dan kontrol terhadap arah komunikasi pemerintahan. Kepemimpinan semacam ini lahir dari kebutuhan jabatan yang menuntut presisi, stabilitas, dan kecepatan, sekaligus dari tuntutan ruang publik yang membutuhkan kejelasan sikap dan konsistensi pesan. Dengan demikian, karakteristik kepemimpinan Teddy tidak hanya relevan dipahami sebagai gaya personal, tetapi juga sebagai

refleksi dari kebutuhan institusional Sekretaris Kabinet dalam menjaga keteraturan pemerintahan di tingkat pusat.

Alasan Penggunaan Pendekatan Komunikasi yang Tegas dan Terstruktur

Pendekatan komunikasi yang tegas dan terstruktur pada dasarnya berkaitan erat dengan karakter objektif jabatan *pendamping pemimpin*. Sekretariat Kabinet merupakan lembaga yang memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan ruang lingkup kerja yang mencakup pengkajian kebijakan, pemberian rekomendasi, penyelesaian hambatan pelaksanaan program pemerintah, pemantauan, evaluasi, pengendalian, serta hubungan kemasyarakatan. Ruang lingkup kerja yang demikian menuntut pola komunikasi yang tidak longgar dan tidak terlalu improvisasional. Setiap pesan yang disampaikan harus memiliki kejelasan arah karena berkaitan langsung dengan ritme koordinasi pemerintahan.

Dalam sejumlah pemberitaan media konvensional (Akashi, 2024), penunjukan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet turut dikaitkan dengan fungsi lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yakni memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden. Media juga menyoroti bahwa fungsi tersebut berkaitan dengan koordinasi kebijakan, penataan komunikasi antarlembaga, serta tanggung jawab administratif yang menuntut ketepatan informasi dan kejelasan arah kebijakan. Dalam konteks itu, gaya komunikasi yang tegas dan terstruktur menjadi relevan karena jabatan Sekretaris Kabinet bekerja dalam ruang koordinasi yang sensitif terhadap ketepatan pesan, pengendalian informasi, dan tindak lanjut kebijakan pemerintah. Dengan demikian, data media konvensional menunjukkan bahwa pola komunikasi pada jabatan ini tidak dapat dilepaskan dari tuntutan efektivitas birokratis, karena setiap pesan yang disampaikan berhubungan langsung dengan ritme kerja pemerintahan dan persepsi publik terhadap konsistensi otoritas eksekutif.

Pola komunikasi yang tegas dan terstruktur dapat dipahami sebagai salah satu syarat bagi berjalannya legitimasi birokratis. Dalam struktur pemerintahan, otoritas tidak hanya bertumpu pada kedudukan formal, tetapi juga pada kejelasan aturan, pembagian tugas, serta kepastian alur kerja yang memungkinkan pesan kebijakan diterima sebagai sesuatu yang sah dan dapat dijalankan secara efektif. Dalam kerangka teori legitimasi, komunikasi yang tersusun secara jelas berperan memperkuat penerimaan, baik di tingkat publik maupun internal organisasi, karena pesan yang disampaikan dipersepsi memiliki dasar kewenangan yang masuk akal, konsisten, dan mampu menopang efektivitas tindakan pemerintah. Dengan demikian, gaya komunikasi yang terstruktur tidak semata-mata merefleksikan karakter jabatan, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme pembentuk legitimasi yang menjaga kepercayaan terhadap konsistensi otoritas eksekutif (Miranti & Alontari, 2025).

Implementasi kebijakan publik yang melibatkan banyak aktor menuntut koordinasi yang jelas, komunikasi yang intensif, serta pembagian peran yang tegas agar tidak terjadi tumpang tindih program dan ketidaksinkronan pelaksanaan (Tenri et al., 2026). Dalam struktur pemerintahan, satu informasi yang tidak dirumuskan secara jelas berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran yang kemudian memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Pendekatan komunikasi yang tegas menjadi penting untuk meminimalkan ambiguitas dan memastikan bahwa setiap aktor birokrasi memahami posisi, tugas, dan arah tindak lanjut secara relatif sama. Dalam birokrasi publik, komunikasi yang cerdas dan jelas diperlukan agar pesan kebijakan tidak menimbulkan multi-tafsir, sebab kualitas komunikasi berpengaruh langsung pada keberhasilan implementasi dan koordinasi kerja antarpelaksana (Dewi, 2011).

Pendekatan komunikasi yang terstruktur dibutuhkan karena Sekretaris Kabinet tidak hanya berhadapan dengan kebutuhan koordinasi internal, tetapi juga dengan kebutuhan menjaga

keterbacaan arah pemerintah di ruang publik. Pemerintahan modern bergerak di tengah arus informasi yang cepat, padat, dan sering kali dipenuhi oleh tafsir yang saling bersaing. Komunikasi yang tidak memiliki pola yang jelas justru dapat memperlebar ruang spekulasi dan menurunkan kejelasan posisi pemerintah. Struktur komunikasi yang rapi karena itu menjadi penting agar informasi resmi tetap memiliki bobot sebagai rujukan utama dalam membaca kebijakan pemerintah (Fauzy, 2026).

Pendekatan komunikasi yang tegas juga berhubungan dengan kebutuhan menjaga sinkronisasi pesan antaraktor pemerintahan. Narasi kebijakan tidak hanya hidup pada satu lembaga, tetapi bergerak melalui kementerian, lembaga, kantor kepresidenan, dan berbagai kanal komunikasi publik. Ketidadaan titik penegasan yang cukup kuat dapat menyebabkan pesan kebijakan terpecah ke dalam banyak versi yang tidak sepenuhnya sejalan (Kustiman, 2026). Peran komunikasi yang tegas menjadi relevan untuk mengonsolidasikan arah pesan agar tidak berkembang menjadi perbedaan interpretasi yang mengganggu efektivitas pemerintah. Pola semacam ini menunjukkan bahwa komunikasi digunakan sebagai alat konsolidasi, bukan sekadar alat penyampaian informasi.

Pilihan terhadap komunikasi yang tegas dan terstruktur juga dapat dipahami sebagai respons terhadap tuntutan kecepatan dalam pemerintahan. Proses pemerintahan tidak hanya menuntut ketepatan keputusan, tetapi juga kecepatan dalam penyaluran instruksi dan penjelasan kebijakan. Komunikasi yang terlalu panjang, terlalu normatif, atau terlalu berhati-hati sering kali menghambat respons institusional. Komunikasi yang padat, terarah, dan operasional justru lebih memungkinkan proses tindak lanjut berlangsung secara cepat. Ketegasan komunikasi dengan demikian memiliki fungsi praktis dalam mempercepat alur keputusan dari tingkat kebijakan ke tingkat pelaksanaan (Kustiman, 2026).

Penggunaan pendekatan yang tegas dan terstruktur memiliki relevansi tinggi dalam komunikasi digital. Pengamat komunikasi digital menilai bahwa aktivitas Teddy Indra Wijaya di media sosial bukan sekadar kehadiran personal, tetapi bagian dari strategi komunikasi publik yang sistematis untuk melakukan klarifikasi isu, merespons informasi yang beredar, dan menjaga keterbukaan di tengah banjir informasi. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang cepat dan jelas diperlukan untuk meredam spekulasi sebelum berkembang menjadi persepsi negatif yang lebih luas. Ketegasan komunikasi di ruang digital pada akhirnya bukan hanya soal gaya berbicara, tetapi tentang kemampuan menjaga ritme komunikasi pemerintah dalam medan opini yang berubah sangat cepat.

Pendekatan tersebut juga berkaitan dengan fungsi protektif terhadap otoritas Presiden. Menurut pengamat, keberadaan Teddy di garis depan dalam melakukan klarifikasi, bantahan, dan respons terhadap polemik membuat Presiden dapat tetap tampil sebagai pemimpin simbolik yang tenang dan strategis di tengah dinamika ruang publik. Pembacaan seperti ini menunjukkan bahwa komunikasi yang tegas dan terstruktur berfungsi sebagai lapisan pelindung institusional. Ketegasan komunikasi bukan hanya dipakai untuk menyeragamkan pesan birokrasi, tetapi juga untuk menjaga agar otoritas tertinggi negara tidak terseret terlalu jauh ke dalam polemik teknis yang berkembang sehari-hari di ruang publik digital.

Tuntutan terhadap stabilitas informasi nasional juga menjelaskan penggunaan pendekatan komunikasi yang tegas dan terstruktur. Ruang publik sangat mudah dipengaruhi oleh hoaks, opini sepihak, dan distorsi informasi, sehingga pejabat yang berada dekat dengan pusat kekuasaan dituntut menghadirkan komunikasi yang mampu menenangkan, menjelaskan, dan menegaskan posisi pemerintah. Pendekatan komunikasi yang tegas dan terstruktur dapat dibaca sebagai upaya menghadirkan kestabilan tafsir di tengah lingkungan informasi yang fluktuatif. Komunikasi seperti

ini tidak hanya penting bagi birokrasi, tetapi juga bagi pemeliharaan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengendalikan arah informasi kebijakan.

Pendekatan yang digunakan Teddy Indra Wijaya juga menunjukkan penyesuaian terhadap karakter audiens kontemporer. Penilaian pengamat menyebut bahwa gaya komunikasinya lebih cair namun tetap berbobot, serta relevan dengan perubahan perilaku audiens digital, terutama kelompok muda yang mendominasi ruang media saat ini. Keadaan ini memperlihatkan bahwa komunikasi yang tegas tidak identik dengan komunikasi yang kaku. Struktur komunikasi yang kuat justru dapat dipadukan dengan cara penyampaian yang adaptif, sehingga pesan tetap dapat diterima tanpa kehilangan wibawa institusionalnya. Ketegasan dan adaptivitas karena itu tidak perlu diposisikan sebagai dua unsur yang saling bertentangan.

Perspektif kelembagaan memperlihatkan bahwa penggunaan pendekatan komunikasi yang tegas dan terstruktur menunjukkan posisi komunikasi sebagai bagian dari manajemen pemerintahan. Komunikasi tidak lagi ditempatkan sebagai unsur tambahan setelah kebijakan dibuat, melainkan sebagai instrumen yang menyertai proses kebijakan sejak awal, baik dalam koordinasi internal maupun dalam penyampaian kepada masyarakat (Wardhana, 2026). Gaya komunikasi yang digunakan Teddy dapat dipahami sebagai refleksi dari cara Sekretariat Kabinet bekerja, yaitu menempatkan ketepatan pesan sebagai bagian dari efektivitas kebijakan. Pendekatan semacam ini menguatkan gagasan bahwa dalam pemerintahan modern, kebijakan dan komunikasi saling menentukan dalam praktiknya.

Pendekatan komunikasi yang tegas juga mencerminkan kebutuhan untuk menjaga kredibilitas institusi. Komunikasi pemerintah yang tidak konsisten cenderung melahirkan kesan ketidakpastian, lemahnya koordinasi, atau bahkan keraguan dalam arah kebijakan. Komunikasi yang jelas, cepat, dan stabil justru memberi kesan bahwa pemerintah memahami persoalan dan memiliki kendali atas situasi. Pilihan Teddy Indra Wijaya terhadap komunikasi yang tegas dapat dibaca sebagai usaha mempertahankan kepercayaan terhadap kapasitas kelembagaan. Ketegasan komunikasi pada akhirnya tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga secara simbolik dalam membangun persepsi tentang pemerintahan yang tertata dan dapat diandalkan.

Pendekatan komunikasi yang tegas dan terstruktur oleh Teddy Indra Wijaya lahir dari perpaduan antara tuntutan jabatan, kebutuhan koordinasi birokrasi, dinamika ruang publik, dan keharusan menjaga legitimasi pemerintah. Pendekatan tersebut bukan sekadar ekspresi personal, melainkan konsekuensi dari posisi strategis Sekretaris Kabinet yang harus memastikan bahwa kebijakan tidak hanya dibuat, tetapi juga dipahami, dijalankan, dan diterima secara tepat. Komunikasi dalam pengertian ini menjadi bagian dari rasionalitas kelembagaan yang dibutuhkan untuk menjaga efektivitas, kestabilan, dan kejelasan arah pemerintahan.

Implikasi Gaya Kepemimpinan dan Pola Instruksi terhadap Kinerja dan Iklim Kerja Kabinet

Gaya kepemimpinan dan pola instruksi yang dijalankan Teddy Indra Wijaya memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas kerja di lingkungan kabinet. namun implikasi ini perlu dibaca bukan sekadar sebagai hasil "instruksi yang jelas menghasilkan kerja yang rapi", melainkan sebagai konsekuensi dari transfer logika komando militer ke dalam struktur birokrasi sipil yang berbasis koordinasi lintas lembaga. Dalam struktur pemerintahan yang bertumpu pada koordinasi lintas lembaga, kejelasan instruksi merupakan unsur yang menentukan cepat atau lambatnya tindak lanjut kebijakan. Pola komunikasi yang tegas, ringkas, dan terarah memungkinkan setiap unit birokrasi membaca prioritas secara lebih pasti. Kondisi tersebut mendorong proses kerja yang lebih efisien karena jalur koordinasi tidak terlalu banyak dibebani oleh ambiguitas penafsiran (Monalisa, 2025). Yang membedakan pola ini dari sekadar komunikasi yang baik secara umum adalah asal-usulnya: ketegasan dan keringkasan tersebut sejalan dengan karakteristik

kepemimpinan militeristik yang telah dibahas pada bagian sebelumnya sistem komando, orientasi hasil, dan minimnya ruang negosiasi makna. Artinya, efisiensi koordinasi yang tercipta bukan semata produk gaya personal, melainkan indikasi bahwa kultur komando dari latar belakang militer Teddy secara fungsional dapat dipindahkan ke dalam mekanisme kerja birokrasi sipil tanpa kehilangan daya gunanya.

Kejelasan instruksi memengaruhi pembentukan ritme kerja kabinet. Ketika arahan disampaikan secara operasional dan tidak berputar-putar, pelaksana kebijakan memperoleh kepastian mengenai apa yang harus dilakukan, dalam urutan seperti apa pekerjaan perlu dijalankan, dan sasaran apa yang hendak dicapai. Pola semacam ini mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih pelaksanaan antarunit kerja. Iklim kerja yang kemudian terbentuk cenderung lebih tertib karena masing-masing unsur birokrasi memiliki batas peran yang lebih terbaca. Namun, jika ditelaah lebih kritis, kepastian semacam ini sesungguhnya menyimpan trade-off yang telah diantisipasi dalam kajian tipologi kepemimpinan militeristik: semakin tinggi kejelasan dan ketegasan arahan, semakin kecil ruang bagi unit pelaksana untuk memberi masukan atau menafsirkan ulang kebijakan sesuai konteks lokal mereka. Dengan kata lain, efisiensi yang tampak pada permukaan berpotensi ditopang oleh penyempitan ruang deliberasi internal sebuah konsekuensi yang secara struktural konsisten dengan karakter komunikasi satu arah pada gaya militeristik, meskipun dalam kasus ini belum tampak menimbulkan resistensi terbuka dari jajaran birokrasi.

Karakter komunikasi yang terstruktur mendorong terbentuknya pola kerja yang berorientasi pada hasil. Dalam birokrasi, efektivitas tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak aktivitas yang dilakukan, tetapi oleh seberapa tepat aktivitas tersebut diarahkan kepada tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi yang lugas memudahkan penyelarasan antara arahan pimpinan dan eksekusi pada tingkat pelaksana. Keadaan ini menjadikan energi organisasi lebih terkonsentrasi pada penyelesaian tugas dibandingkan pada proses menafsir ulang instruksi yang kurang jelas.

Gaya kepemimpinan Sekretariat Kabinet Teddy memberikan dampak pada disiplin organisasi. Ketegasan komunikasi pada dasarnya membentuk batas yang lebih pasti mengenai standar kerja, tanggung jawab, dan ekspektasi kelembagaan. Dalam lingkungan kabinet yang menuntut ketelitian serta respons cepat, disiplin tidak hanya berkaitan dengan etos personal, tetapi menjadi bagian dari syarat kerja institusional. Pola instruksi yang konsisten mendorong terbentuknya kebiasaan kerja yang lebih terukur dan lebih mudah dikendalikan dalam skema koordinasi besar pemerintahan. Iklim komunikasi organisasi yang positif berkontribusi signifikan terhadap terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan harmonis (Harianja *et al.*, 2025). tetapi perlu digarisbawahi bahwa "harmoni" dalam konteks ini kemungkinan besar bersifat harmoni prosedural kepatuhan pada jalur kerja yang sah dan terukur bukan harmoni deliberatif yang lahir dari partisipasi aktif bawahan dalam perumusan arah kebijakan. Perbedaan ini penting karena keduanya menghasilkan stabilitas kerja yang tampak serupa dari luar, namun bertumpu pada mekanisme kekuasaan yang berbeda: satu berbasis kesepakatan bersama, satu lagi berbasis kejelasan otoritas dari atas.

Dampak terhadap disiplin organisasi juga perlu dibaca sebagai bagian dari logika yang sama. Ketegasan komunikasi membentuk batas yang lebih pasti mengenai standar kerja, tanggung jawab, dan ekspektasi kelembagaan, dan dalam lingkungan kabinet yang menuntut ketelitian serta respons cepat, disiplin menjadi bagian dari syarat kerja institusional, bukan sekadar etos personal. Pola instruksi yang konsisten mendorong terbentuknya kebiasaan kerja yang lebih terukur dan lebih mudah dikendalikan dalam skema koordinasi besar pemerintahan. Ketika bawahan memandang kepemimpinan semacam ini sebagai bentuk kontrol yang dapat diprediksi (Nurdin,

2020), yang sesungguhnya terjadi adalah pertukaran implisit antara otonomi interpretatif dengan kepastian psikologis bawahan melepas ruang untuk menafsirkan ulang instruksi, namun sebagai gantinya memperoleh kejelasan arah yang mengurangi beban kognitif dan tekanan administratif-politik. Pertukaran ini menjelaskan mengapa gaya komando yang secara teoritis rawan dibaca sebagai dominasi justru dapat diterima secara internal, sepanjang kepastian yang dihasilkan dirasakan lebih bernilai dibanding kebebasan interpretasi yang hilang.

Pola komunikasi yang kuat turut memengaruhi pengelolaan persepsi internal dalam birokrasi. Ketika pejabat pada posisi strategis menunjukkan kejelasan, konsistensi, dan ketepatan dalam menyampaikan arahan, bawahan cenderung memandang kepemimpinan tersebut sebagai bentuk kontrol yang dapat diprediksi (Nurdin, 2020). Kontrol yang dapat diprediksi memberikan rasa kepastian dalam bekerja karena bawahan tidak perlu terus-menerus menebak arah kebijakan atau maksud pimpinan. Situasi semacam ini penting dalam organisasi pemerintahan karena kepastian arah sering menjadi faktor penentu stabilitas psikologis kerja di tengah tekanan administratif dan politik. Ruang publik memperlihatkan bahwa pola komunikasi Teddy Indra Wijaya juga membentuk kesan positif terhadap cara pemerintah bekerja. Pengamat komunikasi digital menilai bahwa komunikasi Teddy yang responsif dan cepat dalam menanggapi isu yang beredar di media sosial mampu mengurangi kerisauan masyarakat dan membangun persepsi bahwa pemerintah hadir dengan respons yang jelas serta tepat waktu. Penilaian ini menunjukkan bahwa implikasi komunikasi tidak berhenti pada ranah internal birokrasi, tetapi meluas ke wilayah persepsi sosial yang lebih luas. Ketika publik melihat adanya kejelasan sikap dan kecepatan respons, pemerintah cenderung dipandang lebih siap dan lebih terkendali.

Persepsi positif lain muncul dari penilaian bahwa komunikasi Teddy bersifat sederhana dan jujur. Hendri Satrio menilai komunikasi publik Teddy efektif justru karena tidak dipenuhi pidato yang panjang dan tidak dibebani klaim berlebihan, tetapi dibangun melalui kehadiran langsung serta pernyataan singkat yang bertumpu pada pengamatan lapangan. Pola komunikasi seperti ini memberikan implikasi penting terhadap citra pejabat publik karena publik cenderung lebih mudah menerima pesan yang terasa alami, langsung, dan tidak terlalu artifisial. Kesederhanaan komunikasi dalam pengertian ini bukanlah kedangkalan, melainkan kemampuan menyampaikan substansi tanpa kehilangan kesan otentik.

Kinerja institusional Setkab juga tampak berkaitan dengan pola komunikasi yang dibangun. Sekretariat Kabinet disebut berhasil masuk tiga besar lembaga pemerintah dengan kinerja terbaik berdasarkan persepsi publik dalam survei Cyrus Network pada April 2026 dengan skor 86,3 persen, dan peneliti utama survei tersebut menyebut komunikasi publik yang dijalankan Teddy sebagai salah satu faktor penting di balik peningkatan itu (Lantara, 2026). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi publik tidak dapat dipisahkan dari kinerja kelembagaan. Tata kelola yang rapi dan penyampaian kebijakan yang jelas pada akhirnya saling menguatkan dalam membentuk kepercayaan publik terhadap institusi.

Implikasi gaya kepemimpinan dan pola instruksi Teddy Indra Wijaya dapat ditafsirkan melalui keterkaitan antara efektivitas birokrasi dan legitimasi pemerintahan. Sejumlah pemberitaan memperlihatkan bahwa Teddy diposisikan sebagai figur yang menguatkan praktik *empathetic governance* melalui kedekatannya dengan masyarakat, termasuk melalui langkah turun langsung ke akar rumput, yang pada gilirannya membentuk citra komunikasi pemerintahan yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada keterhubungan sosial. Komunikasi publik Istana di bawah koordinasinya tampil lebih solid, responsif, dan kredibel, sehingga memperlihatkan adanya upaya penataan narasi yang terstruktur di lingkungan pemerintahan (Rassat, 2025). Dalam kerangka tersebut, komunikasi pejabat publik tidak lagi sekadar dipahami

sebagai medium penyampaian informasi, melainkan sebagai mekanisme institusional yang menghasilkan persepsi mengenai keteraturan, konsistensi, dan kendali atas jalannya pemerintahan. Ketika komunikasi disusun secara terarah, stabil, dan meyakinkan, publik cenderung menangkap adanya kesatuan antara keputusan, penjelasan, dan tindakan pemerintah, sehingga legitimasi institusional memperoleh penguatan. Dengan demikian, gaya kepemimpinan Teddy tidak hanya merepresentasikan karakter personal dalam memberi instruksi, tetapi juga menunjukkan bagaimana pola komunikasi yang sistematis dapat berkontribusi terhadap terciptanya iklim kerja kabinet yang lebih terkendali sekaligus memperkuat pengakuan publik atas otoritas pemerintahan.

Implikasi dari gaya kepemimpinan dan pola instruksi Teddy Indra Wijaya juga dapat dibaca melalui hubungan antara efektivitas birokrasi dan legitimasi pemerintahan. Pemerintah tidak hanya dinilai dari hasil kebijakan, tetapi juga dari cara kebijakan itu dikomunikasikan, dijelaskan, dan dipertahankan di ruang publik. Komunikasi mampu menghadirkan kesan terarah, stabil, dan meyakinkan, legitimasi pemerintah cenderung menguat karena publik melihat adanya kesatuan antara keputusan, penjelasan, dan tindakan (Natasy & Elvina, 2026). Dalam hal ini, gaya kepemimpinan Teddy memberi kontribusi terhadap penguatan citra bahwa pemerintah bekerja secara terkoordinasi dan memiliki kendali atas arah komunikasinya.

Dalam kerangka legitimasi sebagaimana dijelaskan (Surbakti, 1992), penerimaan masyarakat terhadap kewenangan pemerintah merupakan unsur fundamental yang menentukan sah tidaknya otoritas politik dalam menjalankan keputusan dan kebijakan. Berangkat dari pengertian tersebut, implikasi gaya kepemimpinan dan pola instruksi Teddy Indra Wijaya dapat dipahami sebagai bagian dari proses membangun pengakuan publik atas kewenangan yang dijalankan secara tertib, terarah, dan bertanggung jawab. Pemberitaan media yang menampilkan Teddy sebagai figur yang memperkuat komunikasi publik yang responsif, humanis, dan terkoordinasi menunjukkan bahwa legitimasi tidak hanya bertumpu pada jabatan formal, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan keyakinan bahwa pemerintah bekerja secara efektif, selaras, dan mampu mengendalikan arah kebijakan. Komunikasi yang terstruktur dalam lingkungan Sekretariat Kabinet dapat dibaca sebagai mekanisme legitimasi, karena pola instruksi yang jelas dan konsisten membantu menegaskan kesesuaian antara tindakan pemerintah, penjelasan yang diberikan, dan harapan publik terhadap pemerintahan yang sah.

Secara keseluruhan gaya kepemimpinan dan pola instruksi Teddy Indra Wijaya membawa implikasi yang cenderung positif terhadap kinerja dan iklim kerja kabinet. Komunikasi yang tegas dan terstruktur berkontribusi terhadap kepastian arah, efisiensi koordinasi, dan disiplin organisasi pada tingkat internal. Komunikasi yang responsif, sederhana, dan meyakinkan juga berperan dalam membangun persepsi publik yang positif terhadap pemerintah pada tingkat eksternal. Implikasi utama dari pola kepemimpinan ini dengan demikian terletak pada kemampuannya menghubungkan efektivitas kerja birokrasi dengan pembentukan kepercayaan publik secara bersamaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Gaya kepemimpinan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet memperlihatkan corak komunikasi yang tegas, terstruktur, dan berorientasi pada kejelasan arah. Karakter tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dijalankan tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menertibkan makna, mengonsolidasikan koordinasi, dan menjaga stabilitas kerja birokrasi. Dalam posisi yang berada dekat dengan pusat pengambilan keputusan, gaya ini menegaskan bahwa kepemimpinan Teddy

dibangun atas dasar keteraturan, disiplin, dan konsistensi dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Pendekatan komunikasi yang tegas dan terstruktur dapat dipahami sebagai konsekuensi dari tuntutan jabatan Sekretaris Kabinet yang menuntut ketepatan, kecepatan, dan sinkronisasi kebijakan. Dalam konteks birokrasi yang kompleks serta ruang publik yang dipenuhi arus informasi cepat dan spekulatif, pola komunikasi semacam ini berfungsi untuk meminimalkan ambiguitas, memperjelas arah tindak lanjut, dan menjaga agar pesan pemerintah tetap berada dalam jalur yang dapat dipahami secara seragam. Dengan demikian, pendekatan tersebut lebih tepat dimaknai sebagai bentuk rasionalitas kelembagaan daripada sekadar pilihan gaya personal.

Implikasi dari gaya kepemimpinan dan pola instruksi tersebut cenderung positif terhadap kinerja dan iklim kerja kabinet. Komunikasi yang lugas dan terarah membantu menciptakan kepastian tugas, memperkuat efisiensi koordinasi, dan menjaga disiplin organisasi di tingkat internal. Pada tingkat eksternal, komunikasi yang responsif, sederhana, dan meyakinkan turut membangun persepsi publik yang positif terhadap pemerintah dan memperkuat legitimasi kelembagaan. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi politik dalam jabatan Sekretaris Kabinet memiliki peran penting tidak hanya dalam menjaga efektivitas birokrasi, tetapi juga dalam membentuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini. {Footlight MT Light, size 12, Spacing: before 0 pt; after 0 pt, Line spacing: 1}

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. (2022). Persepsi Publik, Kapasitas Personal dan Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam Mengatasi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(2), 118–136. <https://doi.org/10.33508/jk.v11i2.4278>
- Akashi, N. U. (2024). *Sekretariat Kabinet di Bawah Kementerian Apa? Ini Tugas dan Fungsinya*. Detik.Com.
- Apriady, M., Pananrangi, A. R., & Bahri, S. (2023). Pengaruh Komunikasi Kepemimpinan Terhadap Peningkatan Kinerja Aparat Sipil Negara Pada Bidang Komunikasi Pimpinan Dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju. *Paradigma Journal of Administration*, 1(1), 29–33.
- Ayu Rahma Yulia, Muhammad Rizal Maulana, Aura Pebria Sumarna, Melda Melda, & Haliza Ratu Fauziah. (2025). Gaya Kepemimpinan Militeristik Dan Paternalistik Gubernur Ahmad Luthfi Dalam Pemerintahan Daerah Jawa Tengah. *Ommunity Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 5(6), 1948–1954. <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/ceej.v6i3.8832>
- Artis. (2011). Strategi Komunikasi Public Relations. *Jurnal Sosial Budaya*, 8(02), 184–197.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Azel, N., Syahbani, R., Oktavian, R., Riski, F. A., & Patrianti, T. (2026). Komunikasi Kebijakan Publik yang Efektif: Peran Public Affairs dalam Meningkatkan Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 3(1), 180–187.
- Cahyono, Y. (2026). Koordinasi Antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif. *JLPG/ 14 Journal of Law, Policy, and Governance (JLPG)*, 1(1), 15.

- Carcia, M. S., Angelina, M. F., Rini, O. J., Oktaviana, Luju, M., Sophina, M. D., & Sodi, N. (2025). Hubungan Gaya Komunikasi Pemimpin dengan Efektivitas Pengambilan Keputusan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 2(4), 113–123. <https://doi.org/10.61132/keat.v2i4.1830>
- Dewi, F. U. (2011). Urgensi Komunikasi Cerdas Dalam Birokrasi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(01), 109–124.
- Dunan, A. (2020). Komunikasi Pemerintah di Era Digital: Hubungan Masyarakat dan Demokrasi. *Journal Pekommas*, 5(1), 71.
- Djuyandi, Y. (2023). Development of military role in Indonesian government. *Journal of Governance*, 8(3). <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050108>
- Fadly, A. (2024). *STRATEGI LEGITIMASI DISKURSIF DALAM OPINI MEDIA MASSA NASIONAL*. 7, 242–255.
- Fauzy, M. D. (2026). *Komunikasi Kebijakan dan Tantangan Kepercayaan Publik*. Mediaindonesia.Com. <https://mediaindonesia.com/forum-mahasiswa/847043/komunikasi-kebijakan-dan-tantangan-kepercayaan-publik>
- Genesa, A., Humaizi, H., & Zulkarnain, I. (2025). Strategi Public Relations Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara Membangun Citra Positif dan Kepercayaan Publik. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 7, 354–361.
- Harianja, M. D. M., Ridha, M., Salmawati, Waduha, S., & Nimah, F. (2025). Analisis Iklim Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja, Kepuasan Karyawan dan Kualitas Hubungan Antar Anggota di Lingkungan Kerja Modern. *Komunikasi Kewirausahaan*, 1, 13–20. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/keskap/article/view/14183%0Ahttps://jurnal.umsu.ac.id/index.php/keskap/article/download/14183/8897>
- Husnullail, M., & Dkk. (2024). Teknik Pemeriksaan Data Dalam Riset Ilmiah. *Genta Mulia*, 15(2), 70–78.
- Kustiman, E. (2026). *Menyoal Benang Kusut Komunikasi Publik Pemerintah*. Tugubandung.Id. <https://tugubandung.id/menyoal-benang-kusut-komunikasi-publik-pemerintah/>
- Kusuma, D. A., Yendra, M., Bakhtiar, R., Takdir, M., Handrina, E., & Wahyudi. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Komunikasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Era Digital. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 5(1), 23–33. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v5i1.1206>
- Lantara, F. (2026). *Survei Cyrus Network: Setkab 3 Besar, komunikasi Teddy kunci kepercayaan publik*. Megapolitan.Antaraneews.Com. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/524633/survei-cyrus-network-setkab-3-besar-komunikasi-teddy-kunci-kepercayaan-publik>
- Lukas, K., Pasoreh, Y., & Golung, A. M. (2020). Peran Komunikasi Pemerintahan Dalam membangun Citra Kepemimpinan Di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang-Mongondow. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(1), 1–23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/27109>
- Merdeka, R. (2026). *Pakar: Gaya Komunikasi Seskab Teddy Indra Wijaya Cerminkan Pendekatan Adaptif dan Modern*. Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/politik/pakar-gaya-komunikasi-seskab-teddy-indra-wijaya-cerminkan-pendekatan-adaptif-dan-modern-562245-mvk.html?page=4#google_vignette
- Miranti, D., & Alontari, Y. (2025). Peran Komunikasi Politik Aparatur Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Ilmiah ...*, 01(04), 551–557.

<https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/907%0Ahttps://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/download/907/752>

- Monalisa. (2025). *Birokrasi Pemerintahan* (M. Wijaya, Ed.). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Natasy, S., & Elvina, S. N. (2026). *KOMUNIKASI KRISIS DAN LEGITIMASI PEMERINTAH: ANALISIS WACANA KRITIS PERNYATAAN PEJABAT PUBLIK DALAM BENCANA BANJIR DAN LONGSOR DI SUMATERA NOVEMBER-DESEMBER 2025*. 12(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i02.13741>
- Nilamsari, N. (2014). MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF. *Wacana*, 8(2), 177–1828. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>
- Nurdin, A. (2020). *Teori komunikasi Interpersonal Disertai Contoh Fenomena Praktis* (Witnasari & E. Nuraini, Eds.). Kencan A.
- Purba, M. F. C. M., & Rozikin, A. O. (2025). Dampak Gaya Kepemimpinan dan Komunikasi Internal terhadap Kinerja Karyawan dengan Peran Mediasi Kepuasan Kerja The Impact of Leadership Style and Internal Communication on Employee Performance with the Mediating Role of Job Satisfaction. *JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING TRIDINANTI*, 03(2), 9.
- Pebriawan, G. D., Alim, K., Fatmawati, M. P., & Toyib, M. (2023). Birokrasi Sipil Dan Militer: Dominasi Aktor Militer Dalam Tubuh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2).
- Rassat, F. S. (2025). *Pengamat: Turun ke akar rumput, Teddy perkuat empathetic governance*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/5246993/pengamat-turun-ke-akar-rumput-teddy-perkuat-empathetic-governance>
- Ruhainah, & Wijaya, I. S. (2026). Praktik Komunikasi Pranata Humas dalam Membangun Legitimasi Publik di Era Post-Truth. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4, 237–248.
- Sastrawan, A. (2026). *Komunikasi Pemerintah dalam Menghadapi Kritik Publik untuk Menjaga Legitimasi Kebijakan Publik : Studi Kasus Penyesuaian Harga BBM*. 5(4), 525–531.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik* (Nono & K. Raharjo, Eds.). PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siadari, E. E. (2025). KOMUNIKASI POLITIK DIPLOMASI YANG GAGAL: ANALISIS FRAMING ATAS PEMBERITAAN THE ECONOMIST DAN CHANNEL NEWS ASIA TENTANG LAWATAN INTERNASIONAL PERDANA PRESIDEN PRABOWO. *Konvergensi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 6(2), 352–365.
- Susanto, H. (2019). Urgensi Penggunaan Instrumen Regeling dalam Pembentukan Kebijakan Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Kabinet. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 179–189. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.179-189>
- Teka, S. (2021). Urgensi Desain Collaborative Governance dalam Pemilu dan Pilkada (Studi Kasus Malpraktik Elektoral Tahapan Pencalonan Pemilu DPRD Provinsi NTT dan Pilkada Sabu Raijua). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(1), 1–27.
- Tenri, A., Didi, L., & Hamid, L. O. M. (2026). Dinamika Koordinasi Antar-Lembaga dalam Implementasi Program Nasional Tiga juta Rumah studi di Buton Selatan. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 6308–6319.
- Wakik, A. K. (2026). *Gaya Komunikasi Seskab Teddy Transformasikan Citra Istana Lebih Humanis*. Rmol.Id. <https://rmol.id/politik/read/2026/02/21/698143/gaya-komunikasi-seskab-teddy-transformasikan-citra-istana-lebih-humanis>
- Wardhana, A. (2026). Implementasi Kode Etik Komunikasi Publik dalam Kebijakan Pemerintah: Kajian Normatif terhadap Praktik Komunikasi Resmi Instansi. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik Dan Kebijakan Negara*, 3(1), 304–315.

Yusuf, A., Muryat, A., Rahayuningsih, C. D., Islamy, N., & Sukti, S. (2026). Struktur dan Fungsi Kepemimpinan Politik. *SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA*, 2(3), 1431–1440.